



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Kemampuan Dan Kemauan Membayar Iuran JKN Peserta Mandiri Di Kecamatan Tanjung Morawa

Analysis Of The Ability And Willingness To Pay JKN Contributions By Independent Participants In Tanjung Morawa Subdistrict

Maharani Br Barus¹, Rapotan Hasibuan²

¹ Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, maharanibrbarus33@gmail.com

² Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, maharanibrbarus33@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: maharanibrbarus33@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Jan, 2026

Revised: 08 Feb, 2026

Accepted: 23 Feb, 2026

Kata Kunci:

JKN;

Kemampuan Membayar;

Kemauan Membayar;

Peserta Mandiri;

Keywords:

JKN;

Ability to Pay;

Willingness to Pay;

Independent Participants;

DOI: 10.56338/jks.v9i2.10396

ABSTRAK

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk peserta mandiri yang bukan penerima upah. Namun, tidak seluruh peserta mandiri secara konsisten membayar iuran setiap bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan dan kemauan membayar iuran JKN pada peserta mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa. Desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional*. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *stratified random sampling* dengan jumlah responden sebanyak 104 orang. Data diperoleh melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan uji *chi-square*. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan kemampuan membayar iuran ($p = 0,386$), tetapi terdapat hubungan yang signifikan antara pengeluaran rumah tangga dengan kemampuan membayar ($p = 0,034$). Sementara itu, kemauan membayar iuran JKN memiliki hubungan yang signifikan dengan normatif tarif ($p = 0,001$), persepsi terhadap mutu pelayanan kesehatan ($p = 0,003$), dan riwayat penyakit katastropik ($p = 0,022$). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang menyeluruh, mencakup penyesuaian tarif yang proporsional, peningkatan kualitas pelayanan, dan edukasi berkelanjutan untuk memperkuat partisipasi peserta mandiri serta keberlangsungan program JKN.

ABSTRACT

The National Health Insurance (JKN) is a government program that aims to provide health protection for all Indonesians, including self-employed participants who are not wage earners. However, not all self-employed participants consistently pay their monthly premiums. This study aims to analyze the ability and willingness to pay JKN premiums among self-employed participants in Tanjung Morawa District. The research design used is quantitative with a cross-sectional approach. The sampling technique employed stratified random sampling with a sample size of 104 respondents. Data were collected through a questionnaire and

analyzed using the Chi-Square test. The analysis results indicated no significant association between income and ability to pay premiums ($p = 0.386$), but there was a significant association between household expenditure and ability to pay ($p = 0.034$). Meanwhile, willingness to pay JKN premiums was significantly related to normative tariffs ($p = 0.001$), perceptions of health service quality ($p = 0.003$), and history of catastrophic illness ($p = 0.022$). Therefore, a comprehensive policy approach is needed, including proportional tariff adjustments, improved service quality, and ongoing education to strengthen the participation of self-paying participants and the sustainability of the JKN program.

PENDAHULUAN

Jaminan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/UHC*) merupakan program global yang diinisiasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan menjadi salah satu sasaran utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada target 3.8. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Salah satu program utama yang lahir dari implementasi UU SJSN adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Program JKN mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2014, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, dan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sejak awal pelaksanaannya, JKN ditujukan untuk mencakup seluruh lapisan masyarakat, baik pekerja sektor formal maupun informal, guna menjamin akses terhadap layanan kesehatan yang merata (Yandrizal, Rifa'i, and Utami 2019). Peserta JKN terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Kelompok PBI terdiri atas masyarakat miskin dan tidak mampu, di mana pembayaran iurannya menjadi tanggungan pemerintah. Sementara itu, kategori Non-PBI mencakup tiga golongan, yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP). Kewajiban untuk menjadi peserta juga berlaku bagi warga negara asing (WNA) yang tinggal dan bekerja di Indonesia minimal selama enam bulan.

Peningkatan jumlah peserta JKN tidak diiringi secara seimbang dengan tingkat kemampuan dan kemauan peserta dalam membayar iuran (Indriani Syakhila, Nurgahayu, and Ulfa Sulaeman 2021). Besaran iuran ditentukan berdasarkan kelas layanan yang dipilih, di mana masing-masing kelas memiliki tarif yang berbeda sesuai dengan fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan yang tersedia. Untuk kelas I, iuran ditetapkan sebesar Rp150.000 per orang setiap bulan; kelas II sebesar Rp100.000 per orang per bulan; dan kelas III sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Peserta diwajibkan membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, peserta dapat dikenai sanksi berupa penonaktifan kepesertaan, sehingga tidak dapat memperoleh layanan kesehatan, dan akan dikenakan tambahan biaya apabila ingin mengaktifkan kembali keanggotaannya.

Berdasarkan data DJSN per Oktober 2024, jumlah peserta JKN di Indonesia mencapai 277.538.004 jiwa, yang mencakup sekitar 98,56% dari total populasi sebanyak 281.598.760 jiwa (DJSN 2024). Hal ini menunjukkan bahwa target UHC sebesar 98% sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 telah berhasil tercapai (Helmizah, Putra, and Vanny 2021). Namun, hingga 30 Agustus 2024, tercatat sekitar 56,4 juta peserta JKN berada dalam status non-aktif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14,97 juta peserta dinonaktifkan karena menunggak iuran, dengan jumlah tertinggi berasal dari kelompok PBPU Mandiri yang mencapai 14,74 juta jiwa (Keuangan 2024). Tingginya angka peserta yang menunggak iuran ini mencerminkan persoalan pada aspek kemampuan maupun kemauan untuk membayar iuran JKN (Hidayat et al. 2022).

Kemampuan dan kemauan menjadi dua aspek penting yang memengaruhi pemanfaatan layanan serta berkontribusi terhadap pemerataan akses pelayanan kesehatan (Sudarman, Batara, and Haeruddin 2021). Peningkatan penggunaan layanan kesehatan disertai dengan kenaikan tarif turut mendorong rasio klaim hingga mencapai 107,47%, tanpa diiringi pertumbuhan pendapatan yang sepadan. Hingga 30 Agustus 2024, total pendapatan iuran tercatat sebesar Rp108,9 triliun, sedangkan beban jaminan mencapai Rp117,38 triliun. Kondisi ini menyebabkan penurunan aset sebesar –Rp2,97 triliun.

Ketimpangan antara pendapatan dan beban jaminan tersebut mencerminkan tantangan keuangan yang harus dihadapi BPJS Kesehatan di masa mendatang (Keuangan 2024).

Berdasarkan temuan dari sejumlah penelitian sebelumnya, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kemampuan dan kemauan dalam membayar iuran JKN. Penelitian Hildayanti (2021) menyatakan terdapat pengaruh pendapatan perbulan, jumlah anggota keluarga, persepsi terhadap mutu pelayanan kesehatan, dan riwayat katastrofik terhadap kemampuan membayar dan kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan pada Peserta Mandiri di Kecamatan Takabonerate. Sejalan dengan itu, Sudarman (2021) juga menemukan adanya hubungan antara pendapatan, jumlah anggota keluarga, persepsi mutu pelayanan, dan riwayat katastrofik dengan kemampuan dan kemauan membayar iuran BPJS peserta mandiri di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat.

Berdasarkan data DJSN per Oktober 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang mencapai 2.048.480 jiwa dengan PBPB sebanyak 347.043 jiwa. Kabupaten Deli Serdang mencatat sebanyak 245.829 peserta mandiri belum melunasi iuran JKN, dengan total tunggakan mencapai Rp191.620.738.458. Dari seluruh 22 kecamatan yang ada, Tanjung Morawa termasuk salah satu wilayah dengan tingkat tunggakan yang cukup besar, yaitu sebanyak 21.739 peserta mandiri dengan akumulasi tunggakan sebesar Rp17.449.093.767. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan tunggakan iuran bukan hanya soal jumlah peserta, melainkan juga merupakan indikasi adanya beban sistemik yang berpotensi menimbulkan dampak luas jika tidak segera diatasi (BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam 2025).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sejumlah peserta mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa, diketahui berbagai alasan di balik keterlambatan pembayaran iuran JKN. Beberapa responden menyampaikan bahwa pendapatan mereka lebih diutamakan untuk kebutuhan yang dianggap lebih penting, seperti pembayaran listrik, pemenuhan kebutuhan pangan, serta biaya pendidikan anak. Di samping itu, mereka merasa dalam keadaan sehat dan belum memerlukan pelayanan kesehatan, sehingga kewajiban membayar iuran JKN kerap kali ditanggguhkan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti memandang perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Analisis Kemampuan Dan Kemauan membayar iuran JKN peserta mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi cross-sectional untuk menganalisis kemampuan dan kemauan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN di Kecamatan Tanjung Morawa.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung Morawa pada periode April hingga Juni 2025 dengan populasi penelitian mencakup seluruh peserta mandiri JKN di wilayah tersebut sebanyak 44.038 orang, dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 104 responden.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *stratified random sampling* berdasarkan pembagian wilayah kelurahan. Subjek penelitian adalah peserta mandiri JKN di Kecamatan Tanjung Morawa yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian sebelumnya. Variabel independen meliputi kemampuan membayar (pendapatan dan pengeluaran) dan kemauan membayar (normatif tarif, mutu pelayanan, dan riwayat penyakit katastrofik), sedangkan variabel dependen adalah pembayaran iuran JKN.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada peserta mandiri BPJS Kesehatan dengan menggunakan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, dan BPJS Kesehatan Lubuk Pakam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada

peserta mandiri BPJS Kesehatan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis univariat dan bivariat, dengan uji statistik yang digunakan adalah uji *chi-square* untuk mengetahui hubungan antara variabel penelitian.

HASIL

1. Kemampuan Membayar

Kemampuan membayar peserta JKN Mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa diuraikan melalui beberapa kategori berikut:

a. Hubungan Pendapatan dengan Membayar iuran JKN

Tabel 1. Hubungan pendapatan dengan membayar iuran JKN pada peserta JKN Mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa

Pendapatan	Membayar Iuran JKN						<i>p-value</i>
	Tidak Bayar		Bayar		Total		
	N	%	N	%	N	%	
Rendah ($<Rp3.400.015$)	59	56.7	42	40.4	101	97.1	0.386
Tinggi ($\geq Rp3.400.015$)	1	1.0	2	1.9	3	2.9	
Total	60	57.7	44	42.3	104	100.0	

Sumber: Data Primer 2025

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan dari 101 responden yang berpendapatan rendah (<Rp3.400.015) sebanyak 42 orang (40.4%) membayar, sedangkan 59 orang (56.7%) tidak membayar. Sebaliknya, dari 3 responden yang berpendapatan tinggi (≥Rp3.400.015) sebanyak 2 orang (1.9%) membayar, dan 1 orang (1.0%) tidak membayar. Hasil uji *chi-square* menunjukkan nilai $p = 0,386$ ($p > 0,05$) yang menunjukkan tidak terdapat hubungan antara pendapatan dengan membayar iuran JKN peserta mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa.

b. Hubungan Pengeluaran dengan Membayar iuran JKN

Tabel 2. Hubungan pengeluaran dengan membayar iuran JKN pada peserta JKN Mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa

Kategori Pengeluaran	Membayar Iuran JKN						<i>p- value</i>
	Tidak Bayar		Bayar		Total		
	N	%	N	%	N	%	
Rendah ($< \text{Rp}1.500.556$)	24	23.1	9	8.7	33	31.7	0.034
Tinggi ($\geq \text{Rp}1.500.556$)	36	34.6	35	33.7	71	68.3	
Total	60	57.7	44	42.3	104	100.0	

Sumber: Data Primer 2025

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan dari 33 responden yang pengeluaran rendah (<Rp1.500.556) sebanyak 9 orang (8.7%) membayar, sedangkan 24 orang (23.1%) tidak membayar. Sebaliknya, dari 71 responden yang memiliki pengeluaran tinggi (≥Rp1.500.556) sebanyak 35 orang (33.7%) membayar, dan 36 orang (34.6%) tidak membayar. Hasil uji *chi-square* menunjukkan nilai $p = 0,034$ ($p < 0,05$) yang menunjukkan terdapat hubungan antara pengeluaran dengan membayar iuran JKN peserta mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa.

2. Kemauan Membayar

Kemauan membayar peserta JKN Mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa diuraikan melalui

beberapa kategori berikut:

a. Hubungan Normatif Tarif dengan Membayar iuran JKN

Tabel 3. Hubungan normatif tarif dengan membayar iuran JKN pada peserta JKN Mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa

Normatif Tarif	Membayar Iuran JKN						<i>p-value</i>
	Tidak Bayar		Bayar		Total		
	N	%	N	%	N	%	
<Rp35.000	48	46.2	20	19.2	68	65.4	0.001
Rp35.000	12	11.5	22	21.2	34	32.7	
Rp100.000	0	0.0	2	1.9	2	1.9	
Total	60	57.7	44	42.3	104	100.0	

Sumber: Data Primer 2025

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan dari 68 responden yang normatif tarif <Rp35.000, sebanyak 20 orang (19.2%) membayar, sedangkan 48 orang (46.21%) tidak membayar. Dari 34 responden yang memiliki normatif tarif Rp35.000, sebanyak 22 orang (21.1%) membayar, dan 12 orang (11.5%) tidak membayar. Dan, dari 2 responden yang normatif tarifnya Rp100.000, sebanyak 2 orang (1.9%) membayar. Hasil uji *chi-square* menunjukkan nilai $p = 0,001$ ($p < 0,05$) yang menunjukkan adanya hubungan normatif tarif dengan membayar iuran JKN peserta mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa.

b. Hubungan Persepsi Mutu Pelayanan dengan Membayar iuran JKN

Tabel 4. Hubungan persepsi mutu pelayanan dengan membayar iuran JKN pada peserta JKN Mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa

Kategori Persepsi Mutu Pelayanan	Membayar Iuran JKN						<i>p-value</i>
	Tidak Bayar		Bayar		Total		
	N	%	N	%	N	%	
Kurang Baik	31	29.8	10	9.6	41	39.4	0.003
Baik	29	27.9	34	32.7	63	60.6	
Total	60	57.7	44	42.3	104	100.0	

Sumber: Data Primer 2025

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan dari 41 responden yang persepsi mutu pelayanan kurang baik sebanyak 10 orang (9.6%) membayar, sedangkan 31 orang (29.8%) tidak membayar. Sebaliknya, dari 63 responden persepsi mutu pelayanan baik, sebanyak 34 orang (32.71%) membayar, dan 29 orang (27.9%) tidak membayar. Hasil uji *chi-square* menunjukkan nilai $p = 0,003$ ($p < 0,05$) yang menunjukkan terdapat hubungan antara persepsi mutu pelayanan dengan membayar iuran JKN peserta mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa.

c. Hubungan Riwayat Penyakit Katastropik dengan Membayar iuran JKN

Tabel 5. Hubungan riwayat penyakit katastropik dengan membayar iuran JKN pada peserta JKN Mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa

Riwayat Penyakit Katastropik	Membayar Iuran JKN						<i>p-value</i>
	Tidak Bayar		Bayar		Total		
	N	%	N	%	N	%	
Ada	9	8.7	15	14.4	24	23.1	0.022
Tidak ada	51	49.0	29	27.9	80	76.9	
Total	60	57.7	44	42.3	104	100.0	

Sumber: Data Primer 2025

Berdasarkan Tabel 5 dari 24 responden yang ada riwayat penyakit katastropik sebanyak 15 orang (14.4%) membayar, sedangkan 9 orang (8.7%) tidak membayar. Sebaliknya, dari 80 responden tidak ada riwayat penyakit katastropik, sebanyak 29 orang (27.9%) membayar, dan 51 orang (49.0%) tidak membayar. Hasil uji *chi-square* menunjukkan nilai $p = 0,022$ ($p < 0,05$) yang menunjukkan terdapat hubungan antara riwayat penyakit katastropik dengan membayar iuran JKN peserta mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa.

DISKUSI

a. Hubungan Pendapatan dengan Pembayaran Iuran JKN

Berdasarkan hasil uji statistik *chi square* menghasilkan nilai $p = 0,386$ ($p > 0,05$), yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan kemampuan membayar iuran JKN peserta mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa. Artinya, tinggi atau rendahnya pendapatan tidak memengaruhi apakah seseorang membayar iuran JKN.

Secara umum, orang berpendapatan tinggi dianggap mampu membayar, tetapi pendapatan tidak menjamin seseorang mampu membayar iuran JKN. Hal ini dapat terjadi karena tingginya pendapatan sering diiringi dengan besarnya pengeluaran rumah tangga, sehingga tidak menyisakan dana untuk membayar iuran. Selain itu, setiap orang memiliki skala prioritas yang berbeda; sebagian tidak menempatkan iuran JKN sebagai kebutuhan utama. Sebaliknya, terdapat pula masyarakat dengan pendapatan rendah yang mampu mengelola keuangannya dengan baik sehingga tetap dapat menyisihkan sebagian dana untuk membayar iuran JKN.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Royyan (2021), diperoleh nilai p sebesar 0,191 yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan pendapatan dengan kemampuan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kecamatan Kota Baru dan Jambi Selatan. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Latifah dkk. (2020), di mana diperoleh nilai $p = 0,519$ ($> 0,05$), sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan di Kelurahan Benda Baru.

Dalam penelitian ini, pendapatan responden mengacu pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) Deli Serdang tahun 2024, yaitu sebesar Rp3.400.015. Hasil penelitian memperlihatkan hampir seluruh responden memiliki pendapatan pada kategori rendah, yakni di bawah Rp3.400.015, dengan proporsi mencapai 97,1%. Dan 2,9% termasuk dalam kategori pendapatan tinggi. Secara umum, rata-rata pendapatan responden berada pada angka Rp2.128.846 per bulan, dengan variasi mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp3.500.000.

Temuan ini menggambarkan realitas sosial ekonomi masyarakat Tanjung Morawa, di mana besar penduduk bekerja di sektor informal, seperti IRT, buruh harian, pedagang, wiraswasta dan lainnya dengan pendapatan yang fluktuatif dan terbatas. Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sekaligus membayar iuran JKN secara rutin. Rendahnya tingkat pendapatan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi prioritas pengeluaran, di mana kebutuhan pokok cenderung lebih diutamakan dibandingkan membayar iuran kesehatan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa peserta mandiri di Tanjung Morawa mengalami tunggakan iuran JKN.

Perilaku konsumen atau *consumer behavior* merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan yang mendasari tindakan tersebut. Dalam konteks JKN, perilaku konsumen dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan untuk membayar iuran JKN, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang perlu dipahami agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut penjelasan Kotler dan Keller (2016), faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pembelian konsumen ada tiga yaitu faktor budaya, faktor sosial dan faktor pribadi (Putri Nugraha et al. 2021).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa meskipun peserta sama-sama memiliki pendapatan

rendah, sikap mereka terhadap kewajiban membayar iuran JKN tidak selalu sama. Sebagian peserta tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran karena beban ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok harian, ditambah sifat pendapatan yang tidak menentu, sehingga iuran JKN tidak dianggap sebagai prioritas. Sebaliknya, ada pula peserta yang tetap konsisten membayar walaupun penghasilan mereka terbatas. Hal ini disebabkan adanya kesadaran preventif, di mana mereka rela menyisihkan sebagian kecil pendapatannya untuk membayar iuran dengan pertimbangan bahwa biaya pengobatan tanpa perlindungan JKN berpotensi jauh lebih tinggi dan membebani di kemudian hari.

b. Hubungan Pengeluaran dengan Pembayaran Iuran JKN

Berdasarkan hasil uji statistik *chi square* menghasilkan nilai $p = 0,034$ ($p < 0,05$) yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pengeluaran dengan kemampuan membayar iuran JKN peserta mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa. Artinya, semakin tinggi pengeluaran rumah tangga seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang mampu membayar iuran JKN. Sebaliknya, rumah tangga dengan pengeluaran rendah cenderung lebih banyak yang tidak membayar.

Kemampuan membayar iuran JKN lebih dipengaruhi oleh besar kecilnya pengeluaran, dibandingkan besarnya pendapatan. Pengeluaran yang tinggi menunjukkan kebutuhan dasar sudah terpenuhi dan masih ada sisa dana, sehingga lebih mudah menyisihkan uang untuk membayar iuran, meskipun pendapatannya tidak selalu besar. Jika pendapatan tidak berhubungan dengan kemampuan membayar sedangkan pengeluaran berhubungan maka kemampuan membayar iuran JKN lebih tergantung pada seberapa besar uang yang benar-benar dikeluarkan dalam kehidupan sehari-hari (pengeluaran), bukan seberapa besar pendapatan yang diperoleh. Seseorang bisa berpendapatan tinggi tetapi memiliki banyak beban (utang, cicilan, tanggungan), sehingga tidak mampu membayar iuran.

Dalam penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengeluaran yang relatif tinggi yaitu diatas Rp1.500.556 setiap bulannya, meskipun masih ada sebagian responden yang pengeluarannya tergolong rendah yaitu dibawah Rp1.500.556. Rata-rata pengeluaran rumah tangga responden tercatat sebesar Rp1.909.134 per bulan, dengan variasi mulai dari Rp1.150.000 sebagai yang paling rendah hingga Rp3.400.000 sebagai yang paling tinggi.

Pengeluaran rumah tangga memiliki peran dalam menentukan kemampuan seseorang untuk membayar iuran JKN. Pengeluaran mencerminkan bagaimana dana keluarga dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan lainnya (Sani et al. 2024). Pengeluaran diluar kebutuhan pokok sering menjadi tolok ukur kemampuan finansial yang fleksibel. Jika pengeluaran tersebut relatif tinggi, menandakan bahwa keluarga sudah memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki ruang keuangan untuk membayar iuran JKN secara rutin. Hal ini menunjukkan semakin besar pengeluaran rumah tangga, terutama pengeluaran non-pangan, semakin besar pula kemungkinan mereka mampu dan mau membayar iuran JKN. Sebaliknya, jika hampir seluruh penghasilan digunakan untuk kebutuhan pokok, maka membayar iuran JKN menjadi prioritas yang sulit terpenuhi.

c. Hubungan Normatif Tarif dengan Pembayaran Iuran JKN

Berdasarkan hasil uji statistik *chi square* menghasilkan nilai $p = 0,001$ ($p < 0,05$) yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara normatif tarif dengan kemauan membayar iuran JKN peserta mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa. Artinya, semakin wajar dan layak suatu tarif dirasakan oleh peserta, maka semakin besar pula kemauan mereka membayar iuran JKN. Peserta yang menilai bahwa iuran sesuai dengan nilai manfaat yang diterima cenderung mau membayar iuran JKN.

Data menunjukkan masyarakat cenderung memilih tarif terendah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dkk. (2021), sebanyak 87,5% responden memiliki WTP normatif sesuai tarif untuk kelas 3. Hal ini menunjukkan jika mayoritas responden bersedia membayar iuran JKN dalam kategori kelas pelayanan terendah.

Pembentukan harga dalam teori ekonomi terjadi melalui interaksi antara penawaran (*supply*) dan

permintaan (*demand*) di pasar. Permintaan dan penawaran ini sendiri dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ketika jumlah barang atau jasa termasuk layanan kesehatan yang ditawarkan seimbang dengan jumlah yang diminta, maka akan tercipta keseimbangan harga (Fajri 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, meski tarif telah disesuaikan agar lebih terjangkau, sebagian peserta tetap tidak mau membayar. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendapatan yang tidak menentu, merasa belum membutuhkan layanan JKN karena jarang atau belum sakit. Pengalaman pribadi atau orang terdekat yang pernah mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan juga memengaruhi persepsi mereka terhadap program ini.

Namun demikian, sebagian peserta tetap mau membayar. Hal ini disebabkan oleh kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan, pengalaman positif dengan layanan JKN, atau adanya riwayat penyakit. Dengan kata lain, kemauan membayar tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya tarif, tetapi sejauh mana peserta merasa bahwa JKN benar-benar memberikan manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tarif sudah rendah, tanpa diiringi perbaikan mutu layanan peningkatan kesadaran peserta akan pentingnya perlindungan kesehatan, tingkat partisipasi pembayaran tetap akan rendah.

d. Hubungan Persepsi Mutu Pelayanan dengan Pembayaran Iuran JKN

Berdasarkan hasil uji statistik *chi square* menghasilkan nilai $p = 0,003$ ($p < 0,05$), yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi mutu pelayanan dengan kemauan membayar iuran JKN pada peserta mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa. Artinya, semakin baik mutu pelayanan yang dirasakan oleh peserta, maka semakin besar kemauan mereka untuk membayar iuran. Sebaliknya, jika peserta menilai pelayanan kurang baik, maka kemauan untuk membayar iuran JKN cenderung menurun.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cakke (2024), diperoleh nilai p sebesar 0,000 yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05 menunjukkan ada hubungan persepsi kualitas pelayanan kesehatan terhadap kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Bua Kabupaten Luwu. Penelitian yang memiliki kesamaan hasil juga disampaikan oleh Jannah dkk. (2022), diperoleh nilai p sebesar 0,040 yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05 menunjukkan terdapat hubungan persepsi mutu pelayanan kesehatan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri di wilayah kerja Puskesmas Wawondula.

Dari hasil tanggapan responden, dapat diketahui bahwa penilaian mereka terhadap kualitas layanan fasilitas kesehatan cukup beragam. Sebagian besar memberikan penilaian positif terhadap pelayanan yang diterima. Namun, masih terdapat sejumlah keluhan yang disampaikan, seperti lamanya waktu tunggu, keterbatasan obat-obatan, dan sistem antrian yang dinilai belum optimal. Persepsi ini memengaruhi keteraturan peserta dalam membayar iuran JKN. Ketika layanan yang diberikan sesuai dengan harapan atau kebutuhan mereka, maka peserta akan lebih terdorong untuk tetap melanjutkan pembayaran iuran secara rutin (Hildayanti and Batara 2020).

Konsep utilitas (*utility*), yang menyatakan setiap individu akan berusaha memaksimalkan kepuasan (*utility*) yang diperoleh dari konsumsi suatu barang atau jasa. Semakin tinggi kepuasan yang dirasakan seseorang terhadap suatu produk atau layanan, maka semakin besar pula kerelaan dan kemauan individu untuk mengalokasikan pendapatannya demi mendapatkan manfaat tersebut.

Kepuasan akan mendorong kecenderungan melakukan pembelian ulang atau terus menggunakan produk. Sebaliknya, ketidakpuasan dapat menimbulkan kekecewaan yang mendorong konsumen untuk berhenti membeli atau menggunakan produk tersebut. Terkait pelaksanaan program JKN, apabila masyarakat merasa pelayanan kesehatan yang diterima memadai, responsif, dan memberikan perlindungan kesehatan, maka mereka akan merasakan *utility* yang tinggi. Hal ini menjadikan peserta tetap berpartisipasi aktif dalam program JKN dengan membayar iuran. Namun, apabila pengalaman buruk seperti pelayanan yang lambat, sikap petugas yang kurang ramah, atau ketersediaan layanan yang terbatas maka kepuasan (*utility*) yang diperoleh menjadi rendah. Kondisi ini mengurangi motivasi individu untuk membayar iuran, meskipun pendapatan mereka mencukupi (Wulandari, Syah, and Ernawati 2020).

e. Hubungan Riwayat Penyakit Katastropik dengan Pembayaran iuran JKN

Berdasarkan hasil uji statistik *chi square* menghasilkan nilai $p = 0,022$ ($p < 0,05$), yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit katastrofik dengan kemauan membayar iuran JKN peserta mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa. Artinya, peserta yang memiliki riwayat penyakit katastrofik, baik secara pribadi maupun keluarga, cenderung mau membayar iuran JKN dibandingkan yang tidak memiliki riwayat penyakit tersebut. Hal ini mengindikasikan pengalaman langsung terhadap penyakit berat mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan, sehingga meningkatkan komitmen peserta dalam membayar iuran secara rutin.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursya dan Ulva (2024), diperoleh nilai p sebesar 0,001 yang menunjukkan terdapat hubungan antara riwayat penyakit katastrofik dengan membayar iuran JKN di Kota Padang. Penelitian yang memiliki kesamaan hasil juga disampaikan oleh Hiladayanti dkk. (2020) yaitu terdapat pengaruh riwayat katastrofik terhadap kemampuan membayar dan kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan pada Peserta Mandiri di Kecamatan Takabonerate dengan nilai $p = 0,000 < p = 0,05$.

Individu yang mengalami atau memiliki anggota keluarga dengan penyakit tertentu umumnya mengalami perubahan perilaku, salah satunya meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Salah satu bentuk kesadaran ini tercermin dalam partisipasi pada program jaminan kesehatan sebagai upaya perlindungan terhadap risiko kesehatan di masa mendatang (Notoatmodjo 2010).

Berdasarkan jawaban responden, ditemukan beberapa di antaranya menderita penyakit katastrofik seperti hipertensi. Penyakit ini merupakan salah satu kondisi kronis yang berisiko tinggi menimbulkan komplikasi serius, sehingga digolongkan sebagai penyakit katastrofik yang memerlukan pemantauan dan penanganan jangka panjang. Selain hipertensi, terdapat pula responden yang menderita diabetes dan sebagian lainnya tercatat mengalami penyakit lain seperti asam urat, kolestrol dan rematik, yang dapat mengganggu aktivitas serta kualitas hidup apabila tidak ditangani dengan baik.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian Setiyawati dkk. (2021) bahwa 103 warga di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, sebanyak 46 orang (45%) mengalami tekanan darah tinggi, 11 orang (20%) memiliki kadar hemoglobin (Hb) di bawah normal, 27 orang (26%) mengalami peningkatan kadar gula darah, 20 orang (19,5%) memiliki kadar asam urat tinggi, dan 29 orang (28%) menunjukkan kadar kolesterol yang melebihi batas normal (Setiyawati, M.F. Situmeang, and Suparni 2021).

Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian peserta dengan riwayat penyakit katastrofik bersedia membayar iuran JKN karena menyadari manfaatnya dalam meringankan beban biaya pengobatan. Pengalaman mereka dalam memanfaatkan layanan JKN memperkuat kesadaran akan pentingnya menjadi peserta aktif. Oleh karena itu, membayar iuran secara rutin dianggap sebagai langkah untuk menjaga keberlanjutan akses terhadap layanan kesehatan. Namun, tidak semua individu dengan kondisi serupa memiliki kemauan yang sama. Beberapa tetap enggan membayar karena kendala ekonomi, merasa penyakitnya sudah sembuh, gejalanya ringan, atau memiliki pengalaman kurang memuaskan dengan layanan yang diterima.

Sebaliknya, peserta yang tidak memiliki riwayat penyakit katastrofik cenderung enggan membayar karena merasa sehat dan jarang memerlukan pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, ada pula yang tetap bersedia membayar meskipun tidak memiliki kondisi medis tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kemauan membayar tidak hanya ditentukan oleh kondisi kesehatan, tetapi juga oleh tingkat kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kemampuan dan Kemauan Membayar Iuran JKN Peserta Mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa, maka diperoleh kesimpulan yaitu, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan kemampuan membayar iuran JKN $p\text{-value}$ ($0,386 > 0,05$), yang menunjukkan bahwa besar kecilnya pendapatan tidak selalu memengaruhi keputusan membayar iuran. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengeluaran dengan kemampuan membayar iuran JKN $p\text{-value}$ ($0,034 < 0,05$), artinya peserta dengan pengeluaran lebih tinggi cenderung lebih mampu membayar iuran. Terdapat hubungan signifikan antara normatif tarif iuran dengan kemauan membayar iuran JKN $p\text{-value}$ ($0,001 < 0,05$). Peserta yang menganggap tarif sesuai cenderung lebih bersedia membayar. Terdapat hubungan signifikan antara persepsi terhadap mutu pelayanan dengan kemauan membayar iuran $p\text{-value}$ ($0,018 < 0,05$). Peserta yang menilai mutu pelayanan baik lebih cenderung membayar iuran. Terdapat hubungan signifikan antara riwayat penyakit katastropik dalam keluarga dengan kemauan membayar iuran JKN $p\text{-value}$ ($0,022 < 0,05$). Peserta yang memiliki riwayat penyakit serius lebih terdorong untuk mengikuti program JKN secara aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam. 2025. *Data Nilai Tunggal Dan Jumlah Peserta Mandiri Menunggak Iuran Di Kabupaten Deli Serdang per Kecamatan per November 2024*. Lubuk Pakam.
- DJSN. 2024. "Sistem Monitoring Dan Evaluasi Jaminan Sosial." *DJSN*. <https://kesehatan.djsn.go.id/kesehatan/> (December 20, 2024).
- Fajri, Muhammad Hafidz. 2024. "Analisis Volatilitas Harga Produk Unggas Pada Berbagai Tingkatan Pasar Di Provinsi Jambi."
- Helmizah, Hafiz Dwi Putra, and Cika Vanny. 2021. 2021 Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara *Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage)*.
- Hidayat, Arip, Amran Razak, Balqis, Sukri, A.I Moedjiono, and Anwar. 2022. "Determinants Of Ability And Willingness To Pay National Health Insurance Contributions To Traders At Losari Beach." *Journal of Positive School Psychology* 6(5): 2961–70. <http://journalppw.com>.
- Hildayanti, Andi Nur, and Andi Surahman Batara. 2020. "Determinan Ability To Pay Dan Willingness To Pay Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Di Kecamatan Takabonerate (Studi Kasus Di Kabupaten Kepulauan Selayar) Determinants of The Ability To Pay and The Willingness To Pay Subscription of BPJS Kesehatan On ." 10: 130–37.
- Indriani Syakhila, Nurgahayu, and Ulfa Sulaeman. 2021. "Faktor Yang Berhubungan Dengan ATP (Willingness To Pay) Dan WTP (Willingness To Pay) Dengan Keputusan Penentuan Kelas Iuran BPJS Kesehatan." *Window of Public Health Journal* 2(1): 11–20. doi:10.33096/woph.v2i1.113.
- Kuangan, Kesehatan. 2024. *Monthly Report Monitoring JKN*.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta: Jakarta: Rineka Cipta.
- Putri Nugraha, Jefri, Dian Alfiah, Gairah Sinulingga, Umi Rojiati, Gazi Saloom, Rosmawati, Fathihani, et al. 2021. *Perilaku Konsumen Teori*.
- Sani, Sindi Mutiara, Annisa Eksa Putri Ramadhan, Hera Wati, and Yulianda. 2024. "Ibu Bijak , Keuangan Kuat : Edukasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Bagi Ibu Rumah Tangga." *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)* 2(4): 1263–74.
- Setiyawati, Dewi, Suryani M.F. Situmeang, and Suparni Suparni. 2021. "Penyuluhan Dan Pemeriksaan Kesehatan Di Desa Kerawan Dagang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Mitra Prima* 3(1). doi:10.34012/mitraprima.v3i1.2088.
- Sudarman, Sudarman, Andi Surahman Batara, and Haeruddin Haeruddin. 2021. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kemampuan Dan Kemauan Membayar Iuran BPJS Peserta Mandiri Di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat." *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 11(1): 45–57. doi:10.56338/pjkm.v11i1.1517.
- Wulandari, Ayu, Nur Afrainin Syah, and C H Tuty Ernawati. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Dalam Pembayaran Iuran Program Jaminan

Kesehatan Nasional Di Kota Solok.” *Jurnal Universitas Andalas* 9(1): 7–17.

Yandrizal, Yandrizal, Rifa’i Rifa’i, and Selpa Putri Utami. 2019. “Analisis Kemampuan Dan Kemauan Membayar Iuran Terhadap Pencapaian UHC JKN Di Kota Bengkulu.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 10(1): 3–10. doi:10.24893/jkma.v10i1.156.